

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



2024





DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Alun - alun Utara No. 4 Telp. (0351) 497206 Website: www.dpmptsp.madiunkab.go.id Email: dpmptsp@madiunkab.go.id MADIUN 63121

KETUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

NOMOR: 188.4/ 36 /KPTS/402.106/2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna untuk mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait penyelenggaranan Pelayanan, disetiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP):
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Operasional Prosedur Publik Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 - 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eektronil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5956);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);

- 5. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan ((lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesianNomor 5357);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6617);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6618);
- Peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesian Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur Publik;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;

- Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun
 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 18. Perubahan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
- 19. Peraturan Bupati Madiun Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
- 20. Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.
- 20. Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomr 4 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN BERUSAHA DAN NON PERZINAN BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA: Standar Operasional Prosedur sPerizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
- b. Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS);
- c. Perizinan Berusaha Non Online Single Submission (OSS);

KETIGA: Pelayanan perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, meliputi;

- (1) Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha meliputi;
 - a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);
 - b. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Persetujuan Surat Kelayakan Lingkungan Hidup;
 - d. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
- (2) Perizinan Berusaha Online Single Submission (OSS) mencakup Perizinan Berusaha dengan Tingkat Risiko Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi dan Tinggi.

è

- (3) Perizinan Berusaha Non Online Single Submission (NON-OSS)
 - a. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
 Ruang (PKKPR) Lokal (Kegiatan Berusaha UMK dan Non Berusaha)
 - b. Izin reklame
 - c. Izin Pemakaman dan pengabuan mayat;
 - d. Izin balai kerja khusus (BKK);
 - e. Izin operasional klinik (Bukan BLU/BLUD);
 - f. Surat Izin Praktek Dokter (SIPD)
 - g. Surat Izin Praktek Elektromedis (SIPE)
 - h. Surat izin Praktik Bidan (SIPB);
 - i. Surat izin Praktik Perawat (SIPP);
 - j. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPGTGM);
 - k. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
 - Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
 - m. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
 - n. Surat Izin Praktik Penata Anestasi (SIPPA);
 - o. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT);
 - p. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW);
 - q. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM);
 - r. Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIPTKT);
 - s. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ);
 - t. Surat Izin Kerja Optisien (SIKRO);
 - u. Surat Izin Kerja Optimetris (SIKO);
 - v. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);
 - w. Surat Izin Kerja Tenaga Perekam Medis (SIKPM);
 - x. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitasi (SIPTS);

- y. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ);
- z. Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);
- aa. Surat Izin Penyelenggaraan Akupuntur Terapis (SIPAT);
- bb. Surat Izin Tukang Gigi (SITG);
- cc. STPT Akupunturis;
- dd. STPT Refleksi;
- ee. STPT Pijat Urat;
- ff. STPT Patah Tulang;
- gg. STPT Sunat;
- hh. STPT Chiropractor;
- ii. STPT Jamu;
- jj. STPT Gurah;
- kk. STPT Sinshe:
- Il. STPT Tabib:
- mm. STPT Homeopathi;
- nn. STPTAromaterapi;
- oo. STPT Pendekatan Agama;
- pp. STPT Tenaga Dalam (PRANA)
- qq. STPT Paranormal;
- rr. STPT Reiky Master;
- ss. STPT Qigong;
- tt. STPT Dukun Kebatinan ; dan
- uu.STPT Pengobat Tradisional Lainnya.
- vv. STPT Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu
- ww. Izin Operasional Pendidikan Formal (Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama);
- xx. Izin Operasional Pendidikan Non Formal (Kelompok Bermain, PKBM, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Taman Baca Masyarakat);

- yy. Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH);
- zz. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP KESWAN);
- aaa. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP INSEMINATOR);
- bbb. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKB);
- ccc. Surat Izin Paramedik Veteriner Teknik Reproduksi (SIPP ATR);
- ddd. Surat Izin Usaha Veteriner (SIVET).
- KEEMPAT : Pelayanan pengawasan perizinan Berusaha dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d, meliputi :
 - Penjadwalan Pengawasan Rutin Perizinan Berusaha
 Berbasis Risiko Role Koordinator;
 - Penjadwalan Pengawasan Insidentil Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Role Koordinator;
- KELIMA: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Madiun Pada tanggal 15 Juli 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MADIUN

RIK KRISDIANANTO, S.STP,MH

**NANA Pembina Utama Muda

NIP. 19750925 1996021 003

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Bapak Pj. Bupati

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Madiun

	Nomor SOP	000.8.3.4/1 /SOP/402.106/2024
	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024
LABUPATEA	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
A DIUL	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN		ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH NIP. 19750925 199602 1 003
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
	Nama SOP	(PKKPR)
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Berpendidikan minima	al D3/S1
2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	Mampu mengoperasik	
3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peneyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	50 52 53	si publik (public speaking)
4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peneyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah	Mengerti dan memaha	
5 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Madiu Tahun 2009 - 2029.	n	
6 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Irigasi.		
7 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung.		
8 Peraturan Bupati Madiun Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.		
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop	
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner	
3. SOP Pengawasan	3. Aplikasi OSS RBA	
	4. Jaringan Internet	
	5. Alat Tulis Kantor	

Pencatatan dan pendataan

1. Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam aplikasi OSS RBA

Peringatan

1. Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap

2. Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor

3. Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima

PROSEDUR Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

		PELAKSANA				MUTU BAKU				
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pelaku Usaha	Sistem OSS	DPMPTSP	DPUPR	Perangkat Teknis (BPN/Kantah)	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengisi kelengkapan permohonan investor ke sistem oss.go.id						Persyaratan kajian sebagaimana pada website DPMPTSP	60 menit		
2	Verifikasi pemenuhan persyaratan pemohon di sistem oss.go.id dengan status lengkap	<u> </u>		\rightarrow			Berkas permohonan kajian tata ruang	-		otomatis oleh sistem
3	Proses validasi dan cek list kelengkapan data			т	\\] ,		1 hari	Cek list validasi diterima/ditolak	Dengan catatan sistem berjalan normal
	Pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) oleh Pemohon (guna pengaktifan Service Level Agreement)							1 hari	kuitansi pembayaran	**************************************
5	Proses pertimbangan teknis (pertek) di Kantah	w						10 hari	pertimbangan teknis pertanahan (PTP)	
6	Proses tata ruang tahap II							4 hari	Berita Acara Rapat POKJA (Kelompok Kerja) Forum Penataan Ruang (FPR), Rekomendasi FPR	
7	Pengisian data KKPR di sistem oss.go.id							1 hari	Pengisian Data KKPR hasil FPR	Dengan catatan sistem berjalan normal
8	Pengecekan akhir data kelengkapan KKPR Pemohon							1 hari	Verifikasi akhir data kelengkapan	Dengan catatan sistem berjalan normal

E., 76.

. .

		PELAKSANA					MUTU BAKU			
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pelaku Usaha	Sistem OSS	DPMPTSP	DPUPR	Perangkat Teknis (BPN/Kantah)	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
9	Penerbitan izin KKPR melalui sistem oss.go.id							1 hari	Penerbitan PKKPR melalui sistem oss.go.id	Semua berkas dalam bentuk fisik dan bentuk file
								20 hari		

Catatan

1 hari = 7.5 jam 1 hari = 450 menit

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH NIP. 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/2 /SOP/402.106/2024
ABUPATEA	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH
		NIP. 19750925 199602 1 003
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	1. Berpendidikan minin	nal D3/S1
2 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	2. Mampu mengoperasi	kan komputer dan TIK
3 PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.		asi publik (public speaking)
 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengalolaan lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. 	4. Mengerti dan memah	ami alur kerja OSS RBA/Persetujuan Lingkungan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop	
2. SOP Helpdesk OSS RBA	2. Printer/Scanner	
3. SOP Pengawasan	Jaringan Internet Alat Tulis Kantor	
Peringatan	Pencatatan dan pendata	an
1. Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	1. Kelengkapan persyar	atan pendaftaran perizinan masuk dalam aplikasi SIM
Penampilan neturas nelavanan harva nelalu diigas sampai dengan selesai jam aperasianal kantar		

Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap
 Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor
 Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima

	PELAKSANA						MUTU BAKU		
NO URAIAN PROSEDUR	PEMOHON	TIM PENAPISAN DLH	TIM TEKNIS PEMERIKSA DOKUMEN	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
Pemohon / Pemrakarsa melakukan input OSS RBA								Persetujuan Lingkungan (PKPLH)	Mandiri/pendampingar untuk menentukan KBI sesuai permenlhk no 4 tahun 2021
Pemohon / Pemrakarsa mengajukan permohonan PKPLH									
Penapisan terhadap KBLI kegiatan dan / atau usaha									Mandiri/pendampinga untuk menentukan KBI sesuai permenlik no 4 tahun 2021
3 Penyesuaian KBLI		Tidak		1 Hari Kerja					Tidak : penambahan dan/atau pengurangai KBLI
4 Mengajukan formulir UKL UPL						1. NIB 2. Kesesuaian Tata Ruang (KKPR) 3. Pertek dan Rintek (sesuai jenis kegiatan) 4. Andalalin (pernyataan mandiri) 0. Formulir UKL UPL			
Pemeriksaan Formulir UKL UPL							5 Hari Kerja		
Penyerahan formulir ukl upl yang telah dipriksa oleh Tim Teknis Pemeriksa Dokumen (Diterima atau Perbaikan)			Tidak						

7 Perbaikan Formulir UKL UPL	5 Hari Kerja
Penerbitan kelayakan substansi Formulir UKL UPL	2 Hari Kerja Surat kelayakan substansi formulir ukl upl
Penerbitan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh DPMPTSP An. Bupati Madiun	2 Hari Kerja Persetujuan lingkungan (PKPLH)
PKPLH diterima prmohon/pemrakarsa	
TOTAL WAKTU	14 Hari Kerja

Catatan : 1 Hari Kerja = 7.5 jam 1 Hari Kerja = 450 menit

NIP. 19750925 199602 1 003

LABUPATEN
ELLIE
3

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

NIP. 19750925 199602 1 003 Nama SOP Nama SOP NIP. 19750925 199602 1 003 PERSETUJUAN SURAT KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Nomor SOP

Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh

Tanggal Pembuatan

000.8.3.4/3/SOP/402.106/2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MADIUN

ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH

15 Juli 2024

Dasar Hukum	
	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	1. Berpendidikan minimal D3/S1
2 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK
3 PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	3. Menguasai komunikasi publik (public speaking)
4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengalolaan lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.	4. Mengerti dan memahami alur kerja OSS RBA/persetujuan lingkungan
5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.	
6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop
2. SOP Helpdesk OSS RBA	2. Printer/Scanner
3. SOP Pengawasan	3. Jaringan Internet
	4. Alat Tulis Kantor

Peringatan	Pencatatan dan pendataan
 Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 	1. Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam aplikasi SIMBG

3.

PROSEDUR PERSETUJUAN SURAT KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

		PELA	KSANA		MUTU BAKU		
NO	URAIAN PROSEDUR	PEMOHON	TIM PENAPISAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Pemohon / Pemrakarsa melakukan Input OSS RBA			Akun OSS RBA	1 Hari Kerja	Persetujuan Lingkungan (SPPL)	Mandiri/Pendampingan untuk menentukan KBLI sesuai PermenIhk No 4 Tahun 2021
2	Pemohon melaporkan SPPL ke DPMPTSP			NIB dan SPPL (terbit Otomatis)	2 Hari Kerja		
3	kesesuian KBLI dengan Kegiatan dan/atau Usaha		Tidak				Berita Acara verifikasi
4	SPPL kegiatan dan / usaha sudah sesuai standart pengelolaan lingkungan hidup	-			1 Hari Kerja		VERIFIKASI SURAT KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP
		TOTAL WAR	KTU		4 HARI KERJA		

Catatan : 1 Hari Kerja = 7.5 jam 1 Hari Kerja = 450 menit

ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH

NIP. 19750925 199602 1 003

24	AB	UPA	TEA	1
-	d			-
2		1	1	ž
4		DI		
.0		34		9

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	000.8.3.4/4/SOP/402.106/2024
Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH NIP. 19750925 199602 1 003

Nama SOP

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 1. Berpendidikan minimal D3/S1 2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peneyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 3. Menguasai komunikasi publik (public speaking) 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peneyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah 4. Mengerti dan memahami alur kerja SIMBG Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 6 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2021 tentagn Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009 - 2029. Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 1. SOP Pelayanan Konsultasi 1. Komputer/Laptop 2. SOP Helpdesk OSS RBA 2. Printer/Scanner 3. SOP Pengawasan 3. Aplikasi SIMBG 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor Pencatatan dan pendataan 1. Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap 1. Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam aplikasi SIMBG 2. Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor 3. Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima

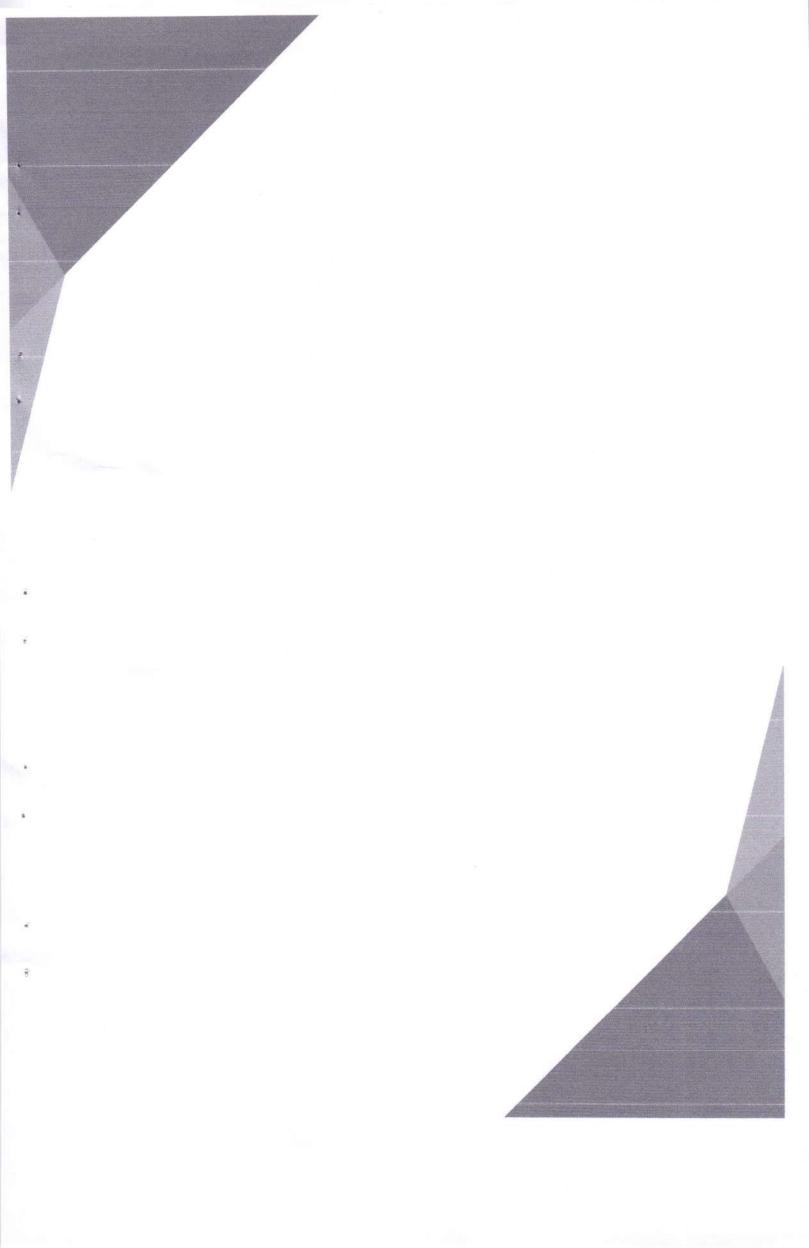
PROSEDUR Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

		PELAKSANA					MUTU BAKU			
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pelaku Usaha	Sistem SIMBG (www.simbg.pu.go.id)	Perangkat Daerah Teknis (DPUPR)	TPA dan TPT	DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Pemohon mengajukan permohonan dan mengunggah kelengkapan data ke SIMBG		→				Pendaftaran pada sistem, Peryaratan kelengkapan dokumen terlampir		Akses masuk sistem	
2	Berkas permohonan yang masuk dalam sistem diverifikasi kelengkapannya oleh Perangkat Daerah Teknis melalui akun Operator Dinas Teknis DPUPR			T			Berkas	1 hari	berkas terverifikasi	
	Perangkat Daerah Teknis melakukan penugasan penilaian, penjadwalan konsultasi dan mengunggah hasil konsultasi TPA/TPT melalui akun Pengawas Dinas Teknis DPUPR				->			25 hari	Hasil Verifikasi Teknis	
	Perangkat Daerah Teknis melakukan perhitungan retribusi dan mengunggah hasil retribusi melalui akun Pengawas Dinas Teknis DPUPR							1 hari	Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD)	
	Perangkat Daerah Teknis melakukan validasi pernyataan pemenuhan standar teknis Bangunan Gedung melalui akun Kepala Dinas Teknis DPUPR								Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Bangunan	
1	DPMPTSP mengunggah SKRD dan melakuakan penagihan retribusi kepada pemohon melalui akun Operator DPMPTSP					→		1 hari		

			PELAKSANA				MUTU BAKU			
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pelaku Usaha	Sistem SIMBG (www.simbg.pu.go.id)	Perangkat Daerah Teknis (DPUPR)	TPA dan TPT	DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
7	Pemohon dapat mengunduh SKRD dan melakukan pembayaran retribusi serta mengunggah bukti pembayaran retribusi melalui akun pemohon dan/atau Pengawas DPMPTSP dapat mengunggah bukti pembayaran retribusi melalui akun Pengawas DPMPTSP					7		1 hari	Bukti Pembayaran	
8	DPMPTSP melakukan validasi retribusi melalui akun Pengawas DPMPTSP					———				
	DPMPTSP melakukan validasi Penerbitan PBG melalui akun Kepala Dinas DPMPTSP dan melakukan penyerahan dokumen PBG melalui akun Operator DPMPTSP							1 hari		
			TOTAL WAKTU					30 hari		

*Apabila pemohon belum jelas bisa konsultasi ke DPUPR (tanpa dipungut biaya) hingga berkas dinyatakan lengkap dan benar **Konsultasi ke TPA 25 hari adalah waktu maksimal, jika sudah lengkap dan benar sebelum 25 hari, bisa dilanjutkan proses berikutnya

ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH NIP. 19750925 199602 1 003



	Nomor SOP	000.8.3.4/5/SOP/402.106/2024		
	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024		
ABUPATEAL	Tanggal Revisi			
	Tanggal Pengesahan			
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPAZEN MADIUN ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH NIP. 19750925 199602 1 003		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang		
	Nama SOP	(PKKPR) Lokal Kegiatan Berusaha UMK		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana			
1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Berpendidikan minimal	D3/S1		
2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik				
3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penayahan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Mampu mengoperasikan komputer dan TIK Menguasai komunikasi publik (public speaking)			
4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peneyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah		Mengerti dan memahami alur kerja OSS RBA		
5 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Madiur Tahun 2009 - 2029.				
6 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Irigasi.				
7 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung.				
8 Peraturan Bupati Madiun Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.				
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan			
1. SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop			
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner			
3. SOP Pengawasan	3. Aplikasi OSS RBA			
	4. Jaringan Internet			
	5. Alat Tulis Kantor			
Peringatan	Pencatatan dan pendataan			
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Kelengkapan persyarat:	an pendaftaran perizinan masuk dalam aplikasi OSS RBA		
 Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 				

PROSEDUR Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Lokal Kegiatan Berusaha Non UMK

Lokal Kegiatan Berusaha UMK

			PELAKSANA			MUTU BAI	KU	
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	оитрит	KETERANGAN
1.	Pernohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	15 hari	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	2 hari	Berkas file pdf yang terverivikasi	550
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	2 hari	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.	$\bigcirc \leftarrow$			Produk Izin	1 hari	produk izin jadi	
						20 hari		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH

Pembina Utama Muda NIP, 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/6/SOP/402.106/2024		
	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024		
LABUPATEN	Tanggal Revisi			
	Tanggal Pengesahan			
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAMAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH NIP. 19750925 199602 1 003		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	Nama SOP	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Lokal Non Berusaha		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana			
1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	1. Berpendidikan minimal	D3/S1		
2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Mampu mengoperasika	an komputer dan TIK		
3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peneyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Menguasai komunikasi publik (public speaking)			
4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peneyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah	4. Mengerti dan memaha	mi alur kerja OSS RBA		
5 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Madiu Tahun 2009 - 2029.		8885 (BBCC0010 (Caster Corp. 1974 (Caster Corp. 197		
6 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2008 tentang Irigasi.				
7 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung.				
8 Peraturan Bupati Madiun Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung.				
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan			
1. SOP Pelayanan Konsultasi	Komputer/Laptop			
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner			
3. SOP Pengawasan	3. Aplikasi OSS RBA			
	Jaringan Internet			
	5. Alat Tulis Kantor			
Peringatan	Pencatatan dan pendataan			
 Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 		an pendaftaran perizinan masuk dalam aplikasi OSS RBA		

(4)

.

10

.

PROSEDUR Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Lokal

(Non Berusaha)

			PELAKSANA			MUTU BA	KU	
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1,	Pernohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	10 hari	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	1 hari	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	1 hari	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.	<u></u>			Produk Izin	1 hari	produk izin jadi	
						14 hari		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

abupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH
Pembina Utama Muda

NIP. 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/7/SOP/402.106/2024			
LABUPATEN	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024			
	Tanggal Revisi				
	Tanggal Pengesahan				
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PENAMAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH NIP. 197509251996021003			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
	- Nama SOP	IZIN REKLAME			
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik .	Berpendidikan minin				
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK				
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	3. Menguasai komunikasi publik (public speaking)				
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	4. Mengerti dan memah	ami alur kerja non OSS RBA			
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.					
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. 7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.					
The state of the s					
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah					
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame	1				
Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun.					
11. Peraturan Bupati Madiun Nomr 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.					
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.					
13. Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2024 Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.					
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan				
SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop				
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner				
3. SOP Pengawasan	3. Aplikasi non OSS RBA	A			
5. SOF Fengawasan	O. The state of th				
3. SOF Pengawasan	4. Jaringan Internet	-			

Pencatatan dan pendataan

1. Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam aplikasi non OSS RBA

Peringatan

Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap
 Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor
 Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima

PROSEDUR IZIN REKLAME

			PELAKSANA					
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Pendidikan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun komtek (BAPENDA).	Tidak	Ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.		~		Rancangan dokumen izin yang tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Produk izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.650 menit (8 hari)		

Catatan

1 hari = 7.5 jam 1 hari = 450 menit

ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH

NIP. 19750925 199602 1 003

LABUPATEN
FICE
3

PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	000.8.3.4/8/SOP/402.106/2024	
Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024	Т
Tanggal Revisi		
Tanggal Pengesahan		
Disahkan oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH NIP. 197509251996021003	
Nama SOP	IZIN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT	

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 tenang Retribusi Jasa Umum; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pemakaman di Kabupaten Madiun; Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelengaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun; Rekomendasi Dinas Perumahan dan Kawasaan Permukiman Kabupaten Madiun Nomor 400/166/402.110/2022 tanggal 31 Januari 2022; Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 20222 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan dan Perizinan Non Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Madiun. 	1. Berpendidikan minimal D3/S1 2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK 3. Mapu mnegoperasikan gawai/smartphone 4. Menguasai komunikasi publik (public speaking) 5. Mampu membaca peta site plane makam 6. Mengetahui lokasi-lokasi makam 7. Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
I. SOP Pelayanan Konsultasi 2. SOP Helpdesk 3. SOP Pengawasan	1. Komputer/Laptop 2. Printer/Scanner 3. Aplikasi non OSS RBA 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor
eringatan Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima	Pencatatan dan pendataan Surat Permohonan dan Pengambilan Surat Izin dicatat dalam buku regester secara manual dan elektronik; Berkas-berkas pemohon yang sudah terbit izinnya dan berkas berkas yang Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam aplikasi

PROSEDUR IZIN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

		PELAKSANA				MUTU BAKU			
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Pendidikan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir	
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Perkim.	Tidak	Ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi		
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi		
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan dokumen izin yang tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan		
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Produk izin	15 menit	produk izin jadi		
						3.650 menit (8 hari)			

Catatan

1 hari = 7.5 jam

1 hari = 450 menit

KEPALA DPMPTS

ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH NIP. 19750925 199602 1 003

30 13



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomer SOP	000.854/9/3110.1.5/402.106/2024
Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH NIP. 19750925 199602 1 003
Nama SOP	IZIN BALAI KERJA KHUSUS (BKK)

Dasar Hukum				
	Kualifikasi pelaksana			
 Undang-undang 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016, tentang Penempatan Tenaga Kerja Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun 	 Berpendidikan minimal S1 Mampu mengoperasikan komputer dan TIK Menguasai komunikasi publik (public speaking) 			
Keterkaitan 1. SOP Pelayanan Konsultasi 2. SOP Helpdesk 3. SOP Pengawasan	Peralatan/perlengkapan 1. Komputer/Laptop 2. Printer/Scanner 3. Alat Tulis Kantor			
Peringatan 1. Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap 2. Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima	Pencatatan dan pendataan 1. Copy surat ijin pendirian atau surat ijin operasional satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, atau surat ijin lembaga pelatihan dari instansi yang berwenang; 2. Copy keputusan pembentukan BKK; 3. Struktur organisasi BKK; 4. Asli Rencana penempatan tenaga kerja paling sedikit satu tahun ke depan.			

PROSEDUR IZIN BALAI KERJA KHUSUS (BKK)

	URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA			MUTU BAKU		
NO.		Pemohon	AKUN SIWALI KOMTEK/PD TEKNIS	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan Sektor Tenaga Kerja	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinaskerin Kab.Madiun.	Tidak	Ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.			+	Rancangan dokumen izin yang tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Produk izin	15 menit	produk izin jadi	
				-		3.630 menit (8 hari)		

Catatan:

1 hari kerja = 7,5 jam 1 hari kerja = 450 menit

ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH

NIP. 19750925 199602 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAMAN TERPADU SATU PINTU KAB UPATEN MADIUN ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH NIP. 19750925 199602 1 003

Nama SOP

Dasar Hukum	Tr. UEL 1 1 1
Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Surat Edaran Dirjen Yankes Kemenkes Nomor YP.02.01/II.2/330/2022 perihal Perizinan Klinik Pemerintah	Kualifikasi pelaksana Berpendidikan minimal D3/S1 Mampu mengoperasikan komputer dan TIK Menguasai komunikasi publik (public speaking) Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pelayanan Konsultasi SOP Helpdesk SOP Pengawasan	1. Komputer/Laptop 2. Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
 Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 	Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftaran

PROSEDUR Izin Operasional Klinik (BUKAN BLU/BLUD)

	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU		
NO.		Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (usemame/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	уа		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.			+	Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.	<u></u>			Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
					3.630 menit (8 hari)			

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP Pembina Utama Muda NIP. 19750925 199602 1 003



Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kanupaten Madiun ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH NIP. 19750925 199602 1 003 Nama SOP Surat Izin Praktek Dokter (SIPD)

000.8.3.4/11/SOP/402.106/2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 1. Berpendidikan minimal D3/S1 2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK 3 Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Menguasai komunikasi publik (public speaking) Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun 4 Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian | 4. Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun 5 Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 1. SOP Pelayanan Konsultasi 1. Komputer/Laptop 2. SOP Helpdesk 2. Printer/Scanner 3. SOP Pengawasan 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor 1. Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Pencatatan dan pendataan 2. Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftaran 3. Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima

Nomor SOP

PROSEDUR Surat Izin Praktek Dokter (SIPD)

			PELAKSANA			MUTU BAK	(U	
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	уа		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.	○ ←			Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP

Pembina Utama Muda NIP, 19750925 199602 1 003

KAR	UPA	TEN
1		10
H	ADIL	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Madiun

ARUK KRISDIANANTO, S.STP.MH

NIP. 19750925 199602 1 003

Nama SOP

Surat Izin Praktek Elektromedis (SIPE)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 	Berpendidikan minimal D3/S1 Mampu mengoperasikan komputer dan TIK Menguasai komunikasi publik (public speaking)
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pelayanan Konsultasi SOP Helpdesk SOP Pengawasan	1. Komputer/Laptop 2. Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima	Pencatatan dan pendataan 1. Kelengkapan dokumen yang diunggah pada saat validasi oleh komtek dinkes

PROSEDUR Surat Izin Praktek Elektromedis (SIPE)

			PELAKSANA			MUTU BAK	(U	
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	оитрит	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.			<u></u>	Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.	$\bigcirc \leftarrow$			Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayahan Terpadu Satu Pintu Kebupaten Madiun ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH

Pembina Utama Muda NIP. 19750925 199602 1 003



Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayahan Terpadu Satu Pintu Kadupaten Madiun ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH NIP. 19750925 199602 1 003 Nama SOP Surat Izin Praktik Bidan SIPB)

000.8.3.4/ 13/SOP/402.106/2024

15 Juli 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3 Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun 4 Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun 5 Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	1. Berpendidikan minimal D3/S1 2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK 3. Menguasai komunikasi publik (public speaking) 4. Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA
Ceterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner
3. SOP Pengawasan	3. Jaringan Internet
	4. Alat Tulis Kantor
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima	Pencatatan dan pendataan 1. Kelengkapan dokumen yang diunggah pada saat validasi oleh komtek dinkes

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

PROSEDUR Surat Izin Praktik Bidan SIPB)

			PELAKSANA			MUTU BAKU		
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	DINKES	DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi Si Wali melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	30 menit		Semua berkas dalam bentuk fisik dan file pdf
	Komtek Perizinan Dinkes melakukan proses validasi sesuai prosedur teknis pada Aplikasi Si Wali melalui akun komtek dinkes, jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun Si Wali DPMPTSP.	Tidak	<u></u>	Ya	Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	30 menit		
	Proses validasi perizinan oleh Penilai Kelayakan Investasi Ahli Muda, Penilai Kelayakan Investasi Ahli Madya dan Kepala Dinas.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	2.700 menit		
4	Izin diserahkan ke Pemohon.		Tidak		Izin	900 menit	Izin	
						3.660 menit		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH Pembina Utama Muda NIP. 19750925 199602 1 003

	Tu	000 9 2 4/44/COD/402 40C/2024		
	Nomor SOP	000.8.3.4/14/SOP/402.106/2024		
ABUPATEN	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024		
	Tanggal Revisi			
	Tanggal Pengesahan			
MADIUA	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatan Madiun		
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN		ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH NIP. 19750925 199602 1 003		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana			
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Berpendidikan minimal D3/S1 Mampu mengoperasikan komputer dan TIK Menguasai komunikasi publik (public speaking) Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA			
2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
3 Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun				
4 Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun				
5 Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan				
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan			
1. SOP Pelayanan Konsultasi	Komputer/Laptop			
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner			
3. SOP Pengawasan	3. Jaringan Internet			
	4. Alat Tulis Kantor			
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Pencatatan dan pendataan			
 Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 		rang diunggah pada saat validasi oleh komtek dinkes		

PROSEDUR Surat Izin Praktik Perawat (SIPP)

PELAKSANA								
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	оитрит	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverlvikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	-
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabusaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayahan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH
NIP. 19750925 199602 1 003

Nama SOP

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPGTGM)

Dasar Hukum	12. 199. 1 . 1 .
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 	1. Berpendidikan minimal D3/S1 2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK 3. Menguasai komunikasi publik (public speaking) 4. Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA
Keterkaitan	
1 SOR Belginson Konstituti	Peralatan/perlengkapan
SOP Pelayanan Konsultasi SOP Helpdesk	1. Komputer/Laptop
3. SOP Pengawasan	2. Printer/Scanner
3. SOF Pengawasan	3. Jaringan Internet
	4. Alat Tulis Kantor
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor	Pencatatan dan pendataan
Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima	Kelengkapan dokumen yang diunggah pada saat validasi oleh komtek dinkes

PROSEDUR Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPGTGM)

			PELAKSANA			MUTU BAK	U	
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	-
	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.	○ ←			Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH Pembina Utama Muda

NIP. 19750925 199602 1 003

NABUPATEN !	
ADIU	
AH KABUPATEN	ı

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP 000.8.3.4/16/SOP/402.106/2024

Tanggal Pembuatan 15 Juli 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Kepala Diyas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabbatan Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH

NIP, 19750925 199602 1 003

Nama SOP Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 	1. Berpendidikan minimal D3/S1 2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK 3. Menguasai komunikasi publik (public speaking) 4. Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner
3. SOP Pengawasan	3. Jaringan Internet
	4. Alat Tulis Kantor
 Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jarn operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 	Pencatatan dan pendataan 1. Kelengkapan dokumen yang diunggah pada saat validasi oleh komtek dinkes

PROSEDUR Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)

	URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA		MUTU BAKU			
NO.		Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pernohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.	—			Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dipas Penanaman Modal dan Pelayahan Terpadu Satu Pintu Kulupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH

Pembina Utama Muda NIP. 19750925 199602 1 003

LABUPATEN	
PA	1
	1
ADIDA	,
-	
A DUD	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

15 Juli 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupatan Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP
NIP. 19750925 199602 1 003

Nama SOP

Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3 Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun 4 Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun 5 Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	1. Berpendidikan minimal D3/S1 2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK 3. Menguasai komunikasi publik (public speaking) 4. Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA
Keterkaitan 1. SOP Pelayanan Konsultasi 2. SOP Helpdesk 3. SOP Pengawasan	Peralatan/perlengkapan 1. Komputer/Laptop 2. Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor
 Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 	Pencatatan dan pendataan 1. Kelengkapan dokumen yang diunggah pada saat validasi oleh komtek dinkes

PROSEDUR Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)

			PELAKSANA			MUTU BAKU		
10.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1,	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.	7			Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverlvikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanam Terpadu Satu Pintu Rabapaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH Pembina Utama Muda NIP, 19750925 199602 1 003

ABUPATE	Nomor SOP Tanggal Pembuatan	000.8.3.4/18/SOP/402.106/2024 15 Juli 2024		
KABUTATEN	Tanggal Revisi	10 0011 2024		
	Tanggal Pengesahan			
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH NIP. 19750925 199602 1 003		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana			
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Berpendidikan minimal	D3/S1		
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Mampu mengoperasikan komputer dan TIK Menguasai komunikasi publik (public speaking)			
Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan				
Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun				
 4 Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun 5 Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 	Mengerti dan memahar	mi alur kerja non OSS RBA		
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan			
SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop			
Keterkaitan 1. SOP Pelayanan Konsultasi 2. SOP Helpdesk				

3. SOP Pengawasan	Jaringan Internet Alat Tulis Kantor
	a, ride range
 Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 	Pencatatan dan pendataan 1. Kelengkapan dokumen yang diunggah pada saat validasi oleh komtek dinkes

PROSEDUR Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF)

		PELAKSANA			MUTU BAKU			
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.			<u></u>	Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayadan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH Pembina Utama Muda NIP. 19750925 199602 1 003

16	LA	BUF	PAT	N	9
1			Bb.	6	1
-	6				
1	9	AD	U	Ü	<i>y</i> -
	60				

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

15 Juli 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayahan Terpadu Satu Pintu

Kadupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH

NIP. 19750925 199602 1 003

Nama SOP

Surat Izin Praktik Penata Anestasi (SIPPA)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 	1. Berpendidikan minimal D3/S1 2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK 3. Menguasai komunikasi publik (public speaking) 4. Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner
3. SOP Pengawasan	3. Jaringan Internet
	4. Alat Tulis Kantor
 Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 	Pencatatan dan pendataan 1. Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftar

PROSEDUR Surat Izin Praktik Penata Anestasi (SIPPA)

		PELAKSANA			MUTU BAKU			
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1,	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.	7			Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
	mar viscou mar no portoriori.	<u></u> ←			No recognitive description			
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dihas Penanaman Modal dan Pelayarian Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH-Pembina Utama Muda NIP, 19750925 199602 1 003

	. 0	LIP	T.	No.	
8	AB	*	ME)	V	100
H		1	1	À	
A		DI	U		
1	<	V			
AH K	(AE	BUF	PAT	EN	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupatan Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH
NIP. 19750925 199602 1 003

Nama SOP

Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)

 Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 	1. Berpendidikan minimal D3/S1 2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK 3. Menguasai komunikasi publik (public speaking) 4. Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA
Keterkaitan 1. SOP Pelayanan Konsultasi 2. SOP Helpdesk 3. SOP Pengawasan	Peralatan/perlengkapan 1. Komputer/Laptop 2. Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor
 Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 	Pencatatan dan pendataan 1. Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftaran

PROSEDUR Surat Izin Praktek Okupasi Terapi (SIPOT)

			PELAKSANA			MUTU BAKU		
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	-
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
				†				
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Renanaman Modal dan Pelayanan Dinadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.ST,MHP Pembina Utama Muda

NIP. 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/21/SOP/402.106/2024		
ABUPATEA	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024		
	Tanggal Revisi			
	Tanggal Pengesahan			
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH NIP, 19750925 199602 1 003		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		NIF. 19790929 199002 1 000		
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana			
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Berpendidikan minimal	D2/E1		
2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Mampu mengoperasikan komputer dan TIK Menguasai komunikasi publik (public speaking)			
3 Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan				
Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun				
 4 Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun 5 Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 	4. Mengerti dan memahan	ni alur kerja non OSS RBA		
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan			
1. SOP Pelayanan Konsultasi	Komputer/Laptop			
2. SOP Helpdesk	Printer/Scanner			
3. SOP Pengawasan	Jaringan Internet			
	4. Alat Tulis Kantor			

Pencatatan dan pendataan

Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftaran

Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap
 Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor
 Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima

PROSEDUR Surat Izin Praktek Terapis Wicara (SIPTW)

			PELAKSANA			MUTU BAK	U	
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	уа		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH

Pembina Utama Muda NIP. 19750925 199602 1 003

	L	000 0 0 4/00/00/00/400 400/0004		
	Nomor SOP	000.8.3.4/22/SOP/402.106/2024		
LABUPATEN	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024		
	Tanggal Revisi			
	Tanggal Pengesahan			
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan		
ADIU		Pelayahan Ternadu Satu Pintu		
		Kabupaten Madiun		
•		Kabupaten Madiun		
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN		ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH		
		NIP. 19750925 199602 1 003		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	Nama SOP	Sarat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIPATLM)		
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		(SIFATLIN)		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana			
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Berpendidikan minimal D	03/S1		
2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2. Mampu mengoperasikan	komputer dan TIK		
3 Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan	Menguasai komunikasi publik (public speaking)			
Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun	Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA			
4 Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas	4. Mengerti dan memanam	alul kelja hon 000 kbA		
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun				
5 Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan				
Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan				
V-L-I-Na	Developen/perlopen			
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan 1. Komputer/Laptop			
SOP Pelayanan Konsultasi SOP Nelayanan Konsultasi	2. Printer/Scanner			
2. SOP Helpdesk				
3. SOP Pengawasan	Jaringan Internet Alat Tulis Kantor			
	4. Alat Tulis Nantur			
	Denostatan dan nandatasa			
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor	Pencatatan dan pendataan 1. Kelengkapan dokumen y	ang diunggah pada saat validasi oleh komtek dinkes		
Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima		0 00		

PROSEDUR Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)

		PELAKSANA			MUTU BAKU			
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	оитрит	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon,				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Produk tzin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Ferpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH Pembina Utama Muda

NIP. 19750925 199602 1 003

40	BUP	ATE	V
d		4	0
		1	
O	AD	U	
0	4		/

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayarian Terpadu Satu Pintu
Kabuarten Madiun

ARIK KRISBIANANTO, S.STE

NIP. 19750925 199602 1 003

Nama SOP

Suray Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIPTKT)

Dasar Hukum	Worldhan alabama
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 	1. Berpendidikan minimal D3/S1 2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK 3. Menguasai komunikasi publik (public speaking) 4. Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner
3. SOP Pengawasan	3. Jaringan Internet
	4. Alat Tulis Kantor
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Pencatatan dan pendataan
Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima	Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftaran
, and postparior prints	

PROSEDUR Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu (SIPTKT Jamu)

			PELAKSANA			MUTU BAK		
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP			-	Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.			<u></u>	Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.	○ ←			Produk Izin	15 menit	produk Izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP Pembina Utama Muda NIP, 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.3/24/SOP/402.106/2024
ABUPATEA	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	Disahkan oleh	Kepala Dipas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabunaten Madiun ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH NIP. 19750925 199602 1 003
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ)
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan		D2/64
2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Berpendidikan minimal D Mampu mengoperasikan	
3 Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun	Menguasai komunikasi p	
4 Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun	4. Mengerti dan memaham	ni alur kerja non OSS RBA
Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan		
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop	
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner	
3. SOP Pengawasan	Jaringan Internet	
	4. Alat Tulis Kantor	
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Pencatatan dan pendataan	
Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima		vang diunggah pada saat validasi oleh komtek dinkes

PROSEDUR Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIKTGz)

			PELAKSANA	ELAKSANA MUTU BAKU		(U		
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP	I			Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	*
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatan Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MR Pembina Utama Muda

3	VA.	BUP	ATEN	2
1	.(Á		
	0	ADI		
	1	V		

Nomor SOP 000.8.3.4/25/SOP/402.106/2024 Tanggal Pembuatan 15 Juli 2024 Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH NIP. 19750925 199602 1 003 Nama SOP Surat Izin Kerja Optisien (SIKRO)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Berpendidikan minimal D3/S1 2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK 3 Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan 3. Menguasai komunikasi publik (public speaking) Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun 4 Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang 4. Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun 5 Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 1. Komputer/Laptop 1. SOP Pelayanan Konsultasi 2. Printer/Scanner 2. SOP Helpdesk 3. SOP Pengawasan Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor 1. Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Pencatatan dan pendataan 2. Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftaran 3. Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima

PROSEDUR Surat Izin Kerja Optisien (SIKRO)

			PELAKSANA			MUTU BAKU		
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP			—	Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	-20
5	Izin diserahkan ke pemohon.	○ ←			Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
	1					3.630 menit (8 hari)		

Kepala Qinas Penanaman Modal dan Pelavanan Terpadu Satu Pintu Radiupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19750925 199602 1 003

NIP. 19750925 199602 1 003



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupatan Madiun

ARIK KRISDIANANTO. S.STP.MH
NIP. 19750925 199602 1 003

Nama SOP

Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)

asar Hukum	Manufest Co.			
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Kualifikasi pelaksana			
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Berpendidikan minimal D3/S1			
Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun	Menguasai komunikasi publik (public speaking) Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA			
San Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun				
Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun				
Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis d Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	an			
eterkaitan				
SOP Pelayanan Konsultasi	Peralatan/perlengkapan			
	1. Komputer/Laptop			
. SOP Helpdesk				
And Andrews and all and a property of the second se	2. Printer/Scanner			
SOP Helpdesk SOP Pengawasan				
And Andrews and all and a property of the second se	2. Printer/Scanner			
SOP Pengawasan	Printer/Scanner Jaringan Internet			
. Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Printer/Scanner Jaringan Internet			
SOP Pengawasan	Printer/Scanner Jaringan Internet Alat Tulis Kantor			
. Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	2. Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor Pencatatan dan pendataan			

PROSEDUR Surat Izin Kerja Optometris (SIKO)

	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			
NO.		Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	оитрит	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.	<u></u> ←			Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH Pembina Utama Muda NIP. 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/27/SOP/402.106/2024	
ABUPATEA	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024	
	Tanggal Revisi		
	Tanggal Pengesahan		
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		NIP. 19750925 199602 1 003	
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)	
 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan 	Berpendidikan minimal D3/S1 Mampu mengoperasikan komputer dan TIK Menguasai komunikasi publik (public speaking) Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA		
leterkaitan	Peralatan/periengkapan		
SOP Pelayanan Konsultasi	Komputer/Laptop		

2. Printer/Scanner

Jaringan Internet
 Alat Tulis Kantor

Pencatatan dan pendataan

1. Kelengkapan dokumen yang diunggah pada saat validasi oleh komtek dinkes

2. SOP Helpdesk

3. SOP Pengawasan

Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap
 Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor
 Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima

PROSEDUR Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)

	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAK	TU .	
NO.		Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Tertampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

ARK KRISDIANANTO, S.STP,MH Pembina Utama Muda

NIP, 19750925 199602 1 003

	-	9116	AT	140	
4				N	1
6	1	y			
1	3	1			1
	4	1		V	
'AH	KA	BU	PA	TEN	N

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupatan Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH

NIP. 19750925 199602 1 003

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 1. Berpendidikan minimal D3/S1 2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK 3 Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun 3. Menguasai komunikasi publik (public speaking) 4 Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian 4. Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun 5 Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 1. SOP Pelayanan Konsultasi Komputer/Laptop 2. SOP Helpdesk 2. Printer/Scanner 3. SOP Pengawasan Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor 1. Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Pencatatan dan pendataan 2. Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftaran 3. Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima

PROSEDUR Surat Izin Kerja Tenaga Perekam Medis (SIKPM)

			PELAKSANA		MUTU BAKU			
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	W
5	zin diserahkan ke pemohon.				Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayahan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH Pembina Utama Muda

NIP. 19750925 199602 1 003

MADIU
ERINTAH KABUPATEN
ODAL DAN PELAYANA

PEME MADIUN

DINAS PENANAMAN MO AN TERPADU SATU PINTU

JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	000.8.3.4/29/SOP/402.106/2024
Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatan Madiun ABIK KRISDIANANTO, S.STP.MH NIP. 19750925 199602 1 003
Nama SOP	Surat Izin Keria Tenaga Sanitasi (SIPTS)

Surat Izin Kerja Tenaga Sanitasi (SIPTS) Nama SOP

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun	1. Berpendidikan minimal D3/S1 2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK 3. Menguasai komunikasi publik (public speaking) 4. Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA
eterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pelayanan Konsultasi SOP Helpdesk SOP Pengawasan	1. Komputer/Laptop 2. Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima	Pencatatan dan pendataan 1. Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftaran

PROSEDUR Surat Izin Kerja Tenaga Sanitasi (SIPTS)

	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			
١٥.		Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon,			Ţ	Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
is a second		<u></u> ←			201.25000 1070000			
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayapan Terpadu Satu Pintu

ARIK KRISDIANANTO. S.STP,MH Pembina Utama Muda NIP. 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/30/SOP/402.106/2024		
allPAs	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024		
TABOTATEN)	Tanggal Revisi			
	Tanggal Pengesahan			
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Verpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH		
		NIP. 19750925 199602 1 003		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	N 50D	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGZ)		
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	Julia izir kerja renega eler (erki ez-)		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana			
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	1. Berpendidikan minimal	D3/S1		
2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK			
3 Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun	Menguasai komunikasi publik (public speaking)			
4 Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun	Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA			
Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan				
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan			
1. SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop			
2. SOP Helpdesk	Printer/Scanner			
3. SOP Pengawasan	Jaringan Internet Alat Tulis Kantor			
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Pencatatan dan pendataa	1		
 Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 	Kelengkapan dokumer	yang diunggah pada saat validasi oleh komtek dinkes		

PROSEDUR Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)

	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			
NO.		Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang tervertvikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	<u></u>
5	Izin diserahkan ke pemohon.	<u></u>			Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
			,			3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Babusaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH Pembina Utama Muda

NIP. 19750925 199602 1 003

	Tu see	000 0 0 4/24/EQD/402 406/2024		
	Nomor SOP	000.8.3.4/31/SOP/402.106/2024		
LABUPATEN	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024		
	Tanggal Revisi			
	Tanggal Pengesahan			
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan		
ADIU		Pelayaran Terpadu Satu Pintu		
		Kabupaten Madiun		
*		Melle		
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN		ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH		
		NIP. 19750925 199602 1 003		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
	Nama SOP	Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)		
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana			
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Berpendidikan minimal	D3/S1		
2 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Mampu mengoperasikan komputer dan TIK			
3 Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan	Menguasai komunikasi publik (public speaking)			
Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun				
4 Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepada Dinas	Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA			
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun				
5 Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan				
Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan				
(eterkaitan	Peralatan/perlengkapan			
SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop			
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner			
3. SOP Pengawasan	Jaringan Internet			
	4. Alat Tulis Kantor			
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Pencatatan dan pendataan	1		
2. Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor	Kelengkapan dokumer	yang diunggah pada saat validasi oleh komtek dinkes		
Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima				

PROSEDUR Surat Izin Kerja Fisioterapis (SIKF)

	URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA		MUTU BAKU			
NO.		Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1,	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.	—			Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	6
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.			+	Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.	<u></u> ←			Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabapaten Madiun

ABAK KRISDIANANTO, S.STP.MH Pembina Utama Muda NIP. 19750925 199602 1 003

CABUPATEA CONTRACTOR OF THE PARTER OF THE PA
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH NIP. 19750925 199602 1 003

000.8.3.4/32/SOP/402.106/2024

15 Juli 2024

Nama SOP Suray zin Penyelenggaraan Akupuntur Terapis (SIPAT)

asar Hukum	Kualifikasi pelaksana
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Peraturan Bupati Madiun Nomor 7 Tahun 2024 Perubahan Atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendelegasial Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/6/2024 tentang Penyelenggaraan Perizinan bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Kesehatan	Berpendidikan minimal D3/S1 Mampu mengoperasikan komputer dan TIK Menguasai komunikasi publik (public speaking)
eterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop
SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner
SOP Pengawasan	3. Jaringan Internet
	4. Alat Tulis Kantor
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	
Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor	Pencatatan dan pendataan
Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima	Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftara

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

PROSEDUR Surat Izin Penyelenggaraan Akupuntur Terapis (SIPAT)

		PELAKSANA			MUTU BAKU			
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	оитрит	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	e *
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon,	<u></u>			Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH Pembina Utama Muda NIP, 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/33/SOP/402.106/2024
ABUPATEA	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
MADIUA	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN		ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH NIP. 19750925 199602 1 003
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	Surat Izin Tukang Gigi (SITG)
	4. Mengeru dan memana	mi alur kerja non OSS RBA
	10	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop	
SOP Pelayanan Konsultasi SOP Helpdesk	Komputer/Laptop Printer/Scanner	
SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop	
SOP Pelayanan Konsultasi SOP Helpdesk	Komputer/Laptop Printer/Scanner Jaringan Internet Alat Tulis Kantor Pencatatan dan pendataar	an pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket l

6 6 2 3 3

19.

PROSEDUR Surat Izin Tukang Gigi

	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			
NO.		Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon,lui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	уа		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.	$\bigcirc \leftarrow$			Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabasaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO. S.STP.MH Pembina Utama Muda NIP. 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/34/SOP/402.106/2024			
ABUPATEN	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024			
	Tanggal Revisi				
	Tanggal Pengesahan				
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan			
ADIUA		Pelayanan Terpadu Satu Pintu			
		Kabapaten Madiun			
		Address Walder			
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN		ARK KRISDIANANTO, S.STP, MH			
		NIP. 19750925 199602 1 003			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Akupunkturis			
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
1 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	Berpendidikan minimal D3/S1 Mampu mengoperasikan komputer dan TIK				
2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris					
3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
	 Menguasai komunikasi publik (public speaking) 				
	4. Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA				
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan				
1. SOP Pelayanan Konsultasi	Komputer/Laptop				
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner				
3. SOP Pengawasan	3. Jaringan Internet				
	4. Alat Tulis Kantor				

Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Pencatatan dan pendataan	n			
 Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 	 Kelengkapan persyara 	tan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftarar			
	10000000 0 To 10000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	and appropriation and admirestration in the contraction of the second of the contraction of the contraction of			

e o e o e o

PROSEDUR Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Akupunkturis

	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			
10.		Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALi pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon,	<u></u>			Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tarpadu Satu Pintu

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH Pembina Utama Muda NIP, 19750925 199602 1 003

LABUPATEN
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	000.8.3.3/35/SOP/402.106/2024
Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH NIP. 19750925 199602 1 003
Nama SOP	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Refleksi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 	 Berpendidikan minimal D3/S1 Mampu mengoperasikan komputer dan TIK Menguasai komunikasi publik (public speaking) Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner
3. SOP Pengawasan	3. Jaringan Internet
	4. Alat Tulis Kantor
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Pencatatan dan pendataan
I. Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap 2. Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor 3. Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima	Pencatatan dan pendataan 1. Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftar

PROSEDUR Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Refleksi

		PELAKSANA			MUTU BAKU			
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan,	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	9
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kebupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH Pembina Utama Muda NIP, 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/36/SOP/402.106/2024		
ABUPATEN	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024		
	Tanggal Revisi			
	Tanggal Pengesahan			
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatan Madiun ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH NIP. 19750925 199602 1 003		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Pijat Urat		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana			
1 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	Berpendidikan minimal D3/S1			
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris	Mampu mengoperasikan komputer dan TIK			
3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan				
	 Menguasai komunikasi publik (public speaking) 			
	Mengerti dan memaha	ami alur kerja non OSS RBA		
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan			
SOP Pelayanan Konsultasi	Komputer/Laptop			
SOP Helpdesk SOP Pengawasan	2. Printer/Scanner			
. OOF Tongawasall	3. Jaringan Internet			
	4. Alat Tulis Kantor			
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Pencatatan dan pendataa	n		
 Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 	1. Kelengkapan persyara	tan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftara		

PROSEDUR Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Pijat Urat

	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			
NO.		Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas,				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	U.
5	izin diserahkan ke pemohon,	<u></u>			Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH Pembina Utama Muda NIP. 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/37/SOP/402.106/2024		
ABUPATEA	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024		
	Tanggal Revisi			
	Tanggal Pengesahan			
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH NIP. 19750925 199602 1 003		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		Sugar Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Patah Tulang		
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	Super Teroattar Penyenat Tradisional (STFT) Falan Falang		
	Kualifikasi pelaksana			
Dasar Hukum 1 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	Berpendidikan minim	ol D2/61		
2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris	1.6			
	Mampu mengoperasikan komputer dan TIK			
3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3. Menguasai komunikasi publik (public speaking)			
	4. Mengerti dan memah	ami alur kerja non OSS RBA		
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan			
SOP Pelayanan Konsultasi	Komputer/Laptop			
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner			
3. SOP Pengawasan	Jaringan Internet Alat Tulis Kantor			
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Pencatatan dan pendata			
Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima	1. Kelengkapan persya	ratan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftaran		

PROSEDUR Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Patah Tulang

	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			
NO.		Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1,	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalul akun pemohon.	—			Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.			+	Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	izin diserahkan ke pemohon.	<u></u> —			Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabapatan Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH Pembina Utama Muda NIP. 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/38/SOP/402.106/2024			
ABUPATES	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024			
ABOPATEN.	Tanggal Revisi	10 0011 2021			
	Tanggal Pengesahan				
NADIU (Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabukaten Madiun			
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN		ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH NIP. 19750925 199602 1 003			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Sunat			
Dasar Hukum 1 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	Kualifikasi pelaksana				
2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris	Berpendidikan minima	I D3/S1			
	Mampu mengoperasikan komputer dan TIK Menguasai komunikasi publik (public speaking)				
3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
	4. Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA				
eterkaitan	Peralatan/perlengkapan				
SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop				
SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner				
SOP Pengawasan	3. Jaringan Internet				
	4. Alat Tulis Kantor				
. Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Pencatatan dan pendataa	n			
2. Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor 3. Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima	Kelengkapan persyara	atan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftar			

PROSEDUR Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Sunat

	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			
NO.		Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan,	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon,	<u></u>			Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH Pembina Utama Muda NIP. 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/39/SOP/402.106/2024			
BUPATEA	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024			
	Tanggal Revisi				
	Tanggal Pengesahan				
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanah Terpadu Satu Pintu Kabupatén Mediun ARK KRISDIANANTO, S.STP.MH NIP. 19750925 199602 1 003			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Chiropractor			
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	Berpendidikan minimal D3/S1 Mampu mengoperasikan komputer dan TIK				
2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris					
3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
	Menguasai komunikasi publik (public speaking)				
	4. Mengerti dan memah	ami alur kerja non OSS RBA			
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan 1. Komputer/Laptop				
SOP Pelayanan Konsultasi SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner				
3. SOP Pengawasan	3. Jaringan Internet				
. oor i siigamaan	4. Alat Tulis Kantor				
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Pencatatan dan pendataa	an			
 Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 	1. Kelengkapan persyara	atan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftarar			

PROSEDUR Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Chiropractor

		PELAKSANA				MUTU BAKU		
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan,	Tidak	уа		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Deadah Iria	45	and the init indi	
3	ын изстанкан ке ретопоп,	\frown			Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tarpadu Satu Pintu Kabupatan Mediun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH Pembina Utama Muda NIP, 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/40/SOP/402.106/2024			
ABUPATEA	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024			
	Tanggal Revisi				
	Tanggal Pengesahan				
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayahan Terpadu Satu Pintu Katupaten Madiun ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH NIP. 19750925 199602 1 003			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		1411 . 157 50525 155652 1 000			
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Jamu			
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
1 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	Berpendidikan minimal D3/S1				
2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris	Mampu mengoperasikan komputer dan TIK				
3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
	3. Menguasai komunikasi publik (public speaking)				
	4. Mengerti dan memaha	ami alur kerja non OSS RBA			
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan				
SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop				
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner				
3. SOP Pengawasan	 Jaringan Internet Alat Tulis Kantor 				
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Pencatatan dan pendataa				
 Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 	Kelengkapan persyara	atan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendafta			

PROSEDUR Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Jamu

		PELAKSANA			MUTU BAKU			
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon,				Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH Pembina Utama Muda NIP, 19750925 199602 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP	000.8.3.4/41/SOP/402.106/2024
Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiru ABIK KRISDIANANTO, S.STP,MH NIP. 19750925 199602 1 003

Nama SOP Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Gurah

Dasar Hukum 1 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1. Berpendidikan minimal D3/S1 2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK 3. Menguasai komunikasi publik (public speaking) 4. Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA
Keterkaitan 1. SOP Pelayanan Konsultasi 2. SOP Helpdesk 3. SOP Pengawasan	Peralatan/perlengkapan 1. Komputer/Laptop 2. Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima	Pencatatan dan pendataan 1. Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftaran

PROSEDUR Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Gurah

PELAKSANA			MUTU BAI					
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanah Terpadu Satu Pintu

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MR Pembina Utama Muda

Pembina Utama Muda NIP. 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/42/SOP/402.106/2024		
ABUPATEA	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024		
	Tanggal Revisi			
	Tanggal Pengesahan			
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
MADIO.		Kabupaten Madiun		
		alle Marian		
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN		ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH		
DINAC DEMANAMAN MODAL DAN DEL AVANAM TERRADA DA COMPANIA		NIP. 19750925 199602 1 003		
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Sinshe		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana			
1 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	Berpendidikan minima	Berpendidikan minimal D3/S1		
2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris				
3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Mampu mengoperasikan komputer dan TIK			
De la compactación de la compactación de compactación de la compactaci	3. Menguasai komunikasi publik (public speaking)			
	Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA			

	1			
	1			
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan			
SOP Pelayanan Konsultasi	Komputer/Laptop			
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner			
3. SOP Pengawasan	3. Jaringan Internet			
	4. Alat Tulis Kantor			
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Pencatatan dan pendataan	n		
 Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 	Kelengkapan persyara	tan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftara		
o. Molaksanakan pelayanan publik beluasarkan azas pelayanan prima	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			

PROSEDUR Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Sinshe

			PELAKSANA			MUTU BAK	U		
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN	
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir	
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi		
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi		
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	•	
5	Izin diserahkan ke pemohon,	$\bigcirc \leftarrow$			Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	==	
_						3.630 menit (8 hari)			

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH
Pembina Utama Muda

Pembina Utama Muda NIP, 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/43/SOP/402.106/2024				
ABUPATEA	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024				
	Tanggal Revisi					
	Tanggal Pengesahan					
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH NIP. 19750925 199602 1 003				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Tabib				
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana					
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	1. Berpendidikan minimal	Berpendidikan minimal D3/S1				
2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris	2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK					
3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Menguasai komunikasi publik (public speaking)					
	3. Menguasai komunikasi	publik (public speaking)				
	4. Mengerti dan memaha	mi alur kerja non OSS RBA				
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan					
SOP Pelayanan Konsultasi	Komputer/Laptop					
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner					
3. SOP Pengawasan	Jaringan Internet					
	4. Alat Tulis Kantor					
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor	Pencatatan dan pendataan	1				

9 9 9 9 9 9

PROSEDUR Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Tabib

			PELAKSANA			MUTU BAK	KU	
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatan Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH Pembina Utama Muda NIP, 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/44/SOP/402.106/2024
ABUPATEA	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatan Madiun ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH
		NIP. 19750925 199602 1 003
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Homeopathi
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	Berpendidikan minimal	D3/S1
2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris	Mampu mengoperasikai	
3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Menguasai komunikasi	publik (public speaking)
	4. Mengerti dan memahan	ni alur kerja non OSS RBA
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop	
2. SOP Helpdesk	Printer/Scanner	
3. SOP Pengawasan	Jaringan Internet	
	4. Alat Tulis Kantor	
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Pencatatan dan pendataan	
2. Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor	4	an pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftaran
Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima	Kelengkapan persyarata	in pendanaran penzinan masuk dalam melalul loket pendanaran

PROSEDUR Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Homeopathi

			PELAKSANA			MUTU BAK	(U	
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon,				Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH Pembina Utama Muda NIP, 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/45/SOP/402.106/2024
LABUPATEA	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024
and the second s	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabutaten Madbun ADIK KRISDIANANTO, S.STP.MH NIP. 19750925 199602 1 003
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	Sur Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Aromaterapi
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	Berpendidikan minima	1.02/04
2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris	The state of the s	
3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Mampu mengoperasik	an komputer dan TIK
and a state of the	Menguasai komunikas	publik (public speaking)
	4. Mengerti dan memaha	mi alur kerja non OSS RBA
		9 25
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop	
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner	
SOP Pengawasan	3. Jaringan Internet	
	4. Alat Tulis Kantor	
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Pencatatan dan pendataar	
2. Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor	A	
Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima	Kelengkapan persyarat	an pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftaran

PROSEDUR Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Aromaterapi

NO.			PELAKSANA			MUTU BAI	KU	
	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pernohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesual akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
Iz	zin diserahkan ke pemohon,	<u></u>			Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH Pembina Utama Muda

NIP. 19750925 199602 1 003

	000.8.3.4/46/SOP/402.106/2024	Nomor SOP	
	15 Juli 2024	Tanggal Pembuatan	OLIDAT
		Tanggal Revisi	LABUPATEN
		Tanggal Pengesahan	
tu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dar Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Disahkan oleh	A POLO
S.STP,MH	Kabupatan Madiun ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH NIP. 19750925 199602 1 003		PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
I (STPT) Pendekatan	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) F		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Agama	Nama SOP	JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Kualifikasi pelaksana	Dasar Hukum
	03/\$1	Berpendidikan minimal I	1 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional
		22	2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
		2. Mampu mengoperasikar	3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
	ublik (public speaking)	Menguasai komunikasi p	3 Peraturan Daeran Nomor 8 Tanun 2011 tentang Penzinan Pasintas Penayahan Nescriatan
	alur kerja non OSS RBA	4. Mengerti dan memaham	
		Peralatan/perlengkapan	Keterkaitan
		Komputer/Laptop	SOP Pelayanan Konsultasi
		2. Printer/Scanner	2. SOP Helpdesk
		3. Jaringan Internet	3. SOP Pengawasan
		4. Alat Tulis Kantor	
		Pencatatan dan pendataan	Pencapajan penyelesajan waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap
elalui loket pendaftaran	n pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket	Kelengkapan persyarata	 Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima
	n pendaftaran perizinan masuk dalam m		Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima

9 0 4 6 0 0 4

PROSEDUR Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Pendekatan Agama

		PELAKSANA			MUTU BAKU			4
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.	—			Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.	$\bigcirc \leftarrow$			Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH.
Pembina Utama Muda

NIP. 19750925 199602 1 003



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nama SOP

Nomor SOP

Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh

Tanggal Pembuatan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Katupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH
NIP. 19750925 199602 1 003

000.8.3.4/47/SOP/402.106/2024

Surat Perdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Tenaga Dalam

JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	(Prana)
Dasar Hukum 1 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris 3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kualifikasi pelaksana 1. Berpendidikan minimal D 2. Mampu mengoperasikan 3. Menguasai komunikasi p 4. Mengerti dan memahami	komputer dan TIK publik (<i>public speaking</i>)
1. SOP Pelayanan Konsultasi 2. SOP Helpdesk 3. SOP Pengawasan 1. Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap 2. Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor 3. Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima	Peralatan/perlengkapan 1. Komputer/Laptop 2. Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor Pencatatan dan pendataan 1. Kelengkapan persyaratan	pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftaran

PROSEDUR Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Tenaga Dalam Prana

		PELAKSANA			MUTU BAKU			
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	оитрит	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.			+	Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	tzin diserahkan ke pemohon,	<u></u>			Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayahan Terpadu Satu Pintu Kadupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH Pembina Utama Muda NIP. 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/48/SOP/402.106/2024			
LABUPATEN	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024			
	Tanggal Revisi				
	Tanggal Pengesahan				
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanal Terpadu Satu Pintu Kaburaten Madiun ABIK KRISDIANANTO, S.STP.MH NIP. 19750925 199602 1 003			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Paranormal			
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
1 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	Berpendidikan minimal	D3/S1			
2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris					
3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Mampu mengoperasikan komputer dan TIK				
The state of the s	Menguasai komunikasi publik (public speaking)				
	Mengerti dan memahan	ni alur kerja non OSS RBA			
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan				
1. SOP Pelayanan Konsultasi	Komputer/Laptop				
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner				
3. SOP Pengawasan	Jaringan Internet				
	4. Alat Tulis Kantor				
 Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor 	Pencatatan dan pendataan				
Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima	' Kelengkapan persyarata	n pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftarar			

9 0 * 4 9 0 9

PROSEDUR Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Paranormal

		PELAKSANA			MUTU BAKU			
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	оитрит	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon,	○ ←			Produk Izin	15 menit	produk izin Jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayahan Terpadu Satu Pintu Katupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S,STP,MH Pembina Utama Muda NIP. 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/49/SOP/402.106/2024			
ABUPATEN	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024			
	Tanggal Revisi				
	Tanggal Pengesahan				
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayahan Terpadu Satu Pintu Kababatan Madiun ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH NIP. 19750925 199602 1 003			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	Surar Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Reiky Master			
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
1 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional		1.0004			
2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris		Berpendidikan minimal D3/S1			
3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Mampu mengoperasikan komputer dan TIK				
5 Peraturan Daeran Nombi 6 Fahun 2011 tentang Penzinan Pasilitas Pejayanan Kesenatan	3. Menguasai komunikasi publik (public speaking)				
		mi alur kerja non OSS RBA			
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan				
SOP Pelayanan Konsultasi	Komputer/Laptop				
2. SOP Helpdesk	Printer/Scanner				
3. SOP Pengawasan	Jaringan Internet				
	4. Alat Tulis Kantor				
Pencapalan penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap					
2. Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor	Pencatatan dan pendataar				
Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima	' Kelengkapan persyarai	lan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftaran			

PROSEDUR Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Reiky Master

		PELAKSANA			MUTU BAKU			
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan,	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
		<u></u>						
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Katupaten Madiun

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH

Pembina Utama Muda NIP. 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/50/SOP/402.106/2024			
LABUPATEN	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024			
	Tanggal Revisi				
	Tanggal Pengesahan				
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	Disahkan o leh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Madiun ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH NIP. 19750925 199602 1 003			
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		/ HIT : 10100020 100002 1000			
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Qigong			
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
1 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	Berpendidikan minimal	D3/S1			
2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris	Mampu mengoperasikan komputer dan TIK				
3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan					
	Menguasai komunikasi publik (public speaking)				
	Mengerti dan memahar	ni alur kerja non OSS RBA			
Keterkaltan	Peralatan/perlengkapan				
1. SOP Pelayanan Konsultasi	Komputer/Laptop				
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner				
3. SOP Pengawasan	3. Jaringan Internet				
	Alat Tulis Kantor				
1. Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Pencatatan dan pendataan				
 Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 	Kelengkapan persyarata	an pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftaran			

PROSEDUR Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Qigong

			PELAKSANA		MUTU BAKU			
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.	7			Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	уз		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayahan Terpadu Satu Pintu

ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH Pembina Utama Muda

NIP. 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/51/SOP/402.106/2024			
ABUPATEAL	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024			
	Tanggal Revisi				
	Tanggal Pengesahan				
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan			
		Pelaypoan Terpadu Satu Pintu			
		Kabupaten Madiun			
	1	Kullace			
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	1	ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH			
PEMERINTAH RABUPATEN MADIUN					
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		NIP. 19750925 199602 1 003			
DINAS FENANAMAN MODAL DAN FELATANAN TERFADO SATU FINTO	Nama SOP	Surat Verdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Dukun Kebatina			
JABATAN FUNGSIONAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	Surat verdattar Penyenat Tradisional (STPT) Dukun Kebalin			
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
1 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional	Berpendidikan minima	al D3/S1			
2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris	The second of the second secon				
3 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Mampu mengoperasikan komputer dan TIK Menguasai komunikasi publik (public speaking)				
o roman o salar roman go o salar so sa					
	4. Mengerti dan memaha	ami alur kerja non OSS RBA			
8					
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan				
SOP Pelayanan Konsultasi	Komputer/Laptop				
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner				
3. SOP Pengawasan	Jaringan Internet				
	4. Alat Tulis Kantor				
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Pencatatan dan pendataa				
 Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 	 Kelengkapan persyara 	atan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftaran			
	1				

0 40 4 my 0 30

9 (9 m) m)

PROSEDUR Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Dukun Kebatinan

	URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA		MUTU BAKU			
NO.		Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tidak	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.	\frown			Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
	·					3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanas Terpadu Satu Pintu

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH

Pembina Utama Muda NIP. 19750925 199602 1 003

lomor SOP anggal Pembuatan anggal Revisi	000.8.3.4/52/SOP/402.106/2024		
	4F 1-11 0004		
anggal Revisi	15 Juli 2024		
anggal Pengesahan			
)isahkan oleh	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatan Madiun		
	ARIK KRISDIANANTO, S.STP.MH NIP. 19750925 199602 1 003		
	Sant Table David Later Line Later La		
Nama SOP	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Pengobat Tradisional Lainnya		
ualifikasi pelaksana			
. Berpendidikan minimal D3	3/S1		
Mampu mengoperasikan komputer dan TIK			
, Mengerti dan memahami	alur kerja non OSS RBA		
eralatan/perlengkapan			
Komputer/Laptop			
Jaringan Internet			
Alat Tulis Kantor			
encatatan dan pendataan			
-	eralatan/perlengkapan Komputer/Laptop Printer/Scanner Jaringan Internet Alat Tulis Kantor		

PROSEDUR Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) Pengobat Tradisional Lainnya

			PELAKSANA					
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	ОИТРИТ	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun Dinas Kesehatan.	Tīdək	ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan Dokumen Izin Yang Tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon,	$\bigcirc \leftarrow$			Produk Izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.630 menit (8 hari)		

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayapan Terpadu Satu Pintu

Bubupaten Madiur

ARIK KRISDIANANTO, S.STP,MH Pembina Utama Muda NIP. 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/54/SOP/402.106/2024
LABUPATEAL	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024
	Tanggal Revisi "	
	Tanggal Pengesahan	
, ADIU,	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABURATEN MADIUN ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH NIP. 19750925 199602 1 003
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL (TAMAN KANAK-KANAK,SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA)
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektroni Sektor Pendidikan Kabupaten Madiun; Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan d Kabupaten Madiun Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor Pendidikan 	Berpendidikan minim Mampu mengoperasil	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
1. SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop	
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner	
3. SOP Pengawasan	3. Aplikasi non OSS RBA	A
	4. Jaringan Internet	
	5. Alat Tulis Kantor	
Peringatan	Pencatatan dan pendatas	an
1. Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Kelengkapan persyara	atan pendaftaran perizinan masuk dalam aplikasi non OS

PROSEDUR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL (TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA)

			PELAKSANA			MUTU BAKI	J	
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.	<u> </u>			Persyaratan Perizinan sektor Pendidikan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun komtek (Dinas Pendidikan).	Tidak	Ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan dokumen izin yang tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	lzin diserahkan ke pemohon.				Produk izin	15 menit	produk izin jadi	
						3.650 menit (8 hari)		

Catatan

1 hari = 7.5 jam

1 hari = 450 menit

PALA DPMPTS

ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH

NIP. 19750925 199602 1 003

	Nomor SOP	000.8.3.4/55/SOP/402.106/2024	
all Day	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024	
LABURATEN	Tanggal Revisi	TO CHI ACA !	
	Tanggal Pengesahan		
MADIU	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH NIP. 19750925 199602 1 003	
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	IZM OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (KELOMPOK BERMAIN, PKBM, LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN, TAMAN BACA MASYARAKAT)	
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana		
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;	1. Berpendidikan minimal D3/S1		
 Peraturan Bupati Madiun Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Kabupaten Madiun; 	2. Mampu mengoperasik	an komputer dan TIK	
3 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Madiun			
4 Peraturan Bupati Madiun Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan		
SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop		
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner		
3. SOP Pengawasan	3. Aplikasi non OSS RBA		
	4. Jaringan Internet		
	5. Alat Tulis Kantor		
Peringatan	Pencatatan dan pendataa	an	
Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	1. Kelengkapan persyara	atan pendaftaran perizinan masuk dalam aplikasi non OS	
Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima	1. RBA		

PROSEDUR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (KELOMPOK BERMAIN, PKBM, LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN, TAMAN BACA MASYARAKAT)

			PELAKSANA			MUTU BAKI	J	
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	Akun SIWALI Komtek /PD Teknis	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.	<u> </u>			Persyaratan Perizinan sektor Pendidikan	15 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun komtek (Dinas Pendidikan).	Tidak	Ya		Checklist Berkas dan Rekomendasi/Berita acara/Surat keterangan	2.250 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Dokumen file	900 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Rancangan dokumen izin yang tervalidasi	450 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	lzin diserahkan ke pemohon.				Produk izin	15 menit	produk izin jadi	
	L					3.650 menit (8 hari)		

Catatan

1 hari = 7.5 jam

1 hari = 450 menit

ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MN

NIP. 19750925 199602 1 003

LABUPATEN !
MADIUA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

15 Juli 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN

ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH
NIP. 19750925 199602 1 003

Nama SOP

SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIP DRH)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Undang - undang Nomor 18 tahun 2019 jo Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Permentan RI Nomor 03 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner Permentan RI Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertaninan Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan SOP Pelayanan Konsultasi SOP Pelayanan Konsultasi SOP Pengawasan	1. Berpendidikan minimal D3/S1 2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK 3. Menguasai komunikasi publik (public speaking) 4. Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA Peralatan/perlengkapan 1. Komputer/Laptop 2. Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
 Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 	Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftaran

PROSEDUR SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIP DRH)

			PELAKSANA			MUTU BAKU		
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	AKUN SIWALI KOMTEK/PD TEKNIS	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.	\frown			Persyaratan Perizinan sektor Keswan.	5 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun DKPP Kab.Madiun.	Tidak	Ya		Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	450 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	4
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Checklist Penilaian Kesesuaian	2.250 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Rekomendasi Perangkat Daerah Teknis	900 menit	produk izin jadi	
						3.635 menit (8 hari)		

Catatan

1 hari kerja = 7.5 jam

1 hari kerja = 450 menit

KEPALA DEMPTSP,

ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH NIP. 19750925 199602 1 003

KA	BUPA	ATEN
40	H	

ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH NIP. 19750925 199602 1 003

15 Juli 2024

000.8.3.4/57/SOP/402.106/2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nama SOP

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN KESEHATAN HEWAN (SIPP KESWAN)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN

	Manu 501	RESERVAN
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Undang - undang Nomor 18 tahun 2019 jo Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 	Berpendidikan minima Mampu mengoperasik Menguasai komunika	kan komputer dan TIK asi publik (<i>public speaking</i>)
 4 Permentan RI Nomor 03 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner 5 Permentan RI Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar 7 Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertaninan 8 Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan 	4. Mengerti dan memana	ami alur kerja non OSS RBA
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	1
SOP Pelayanan Konsultasi SOP Helpdesk SOP Pengawasan	Komputer/Laptop Printer/Scanner Jaringan Internet Alat Tulis Kantor	
Peringatan 1. Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap 2. Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor 3. Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima	Pencatatan dan pendata 1. Kelengkapan persya pendaftaran	aan aratan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket

PROSEDUR SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN (SIP DRH)

			PELAKSANA			MUTU BA	KU	
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	AKUN SIWALI KOMTEK/PD TEKNIS	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.	—				5 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun DKPP Kab.Madiun.	Tidak	Ya		Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	450 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Checklist Penilaian Kesesuaian	2.250 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Rekomendasi Perangkat Daerah Teknis	900 menit	produk izin jadi	
					•	3.635 menit (8 hari)		

Catatan

1 hari kerja = 7.5 jam

1 hari kerja = 450 menit

KEPALA DPMPTSI

ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH NIP. 19750925 199602 1 003

KA	BUPA	ATEN	
A	*		1
	1		
O	ADI	U	
-	V		

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ī	Nomor SOP	000.8.3.4/58/SOP/402.106/2024
	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MADIUN ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH NIP. 19750925 199602 1 003
_	Nama SOP	SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN

INSEMINATOR (SIPP INSEMINATOR)

Nama SOP

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Berpendidikan minimal D3/S1
Undang - undang Nomor 18 tahun 2019 jo Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK
 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 4 Permentan RI Nomor 03 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner 	Menguasai komunikasi publik (public speaking) Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA
5 Permentan RI Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner	4. Mengerti dan memanami atur kerja non OSS KBA
6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar	L.
7 Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertaninan	
8 Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner
3. SOP Pengawasan	3. Jaringan Internet
	4. Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftaran
 Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 	

PROSEDUR SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN INSEMINATOR (SIPP INSEMINATOR)

	URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA		MUTU BAKU			
NO.		Pemohon	AKUN SIWALI KOMTEK/PD TEKNIS	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Keswan.	5 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun DKPP Kab.Madiun.	Tidak	Уа		Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	450 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Checklist Penilaian Kesesuaian	2.250 menit	Rancangan dokumen perizinan	1.7
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Rekomendasi Perangkat Daerah Teknis	900 menit	produk izin jadi	
						3.635 menit (8 hari)		

Catatan

1 hari kerja = 7.5 jam

1 hari kerja = 450 menit

KEPAL

ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH NIP. 19750925 199602 1 003

· W	¥.A	BUP	ATE	V
		顣	lh	
-		4	1	
	4	AD	U	

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN

ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH
NIP. 19750925 199602 1 003

SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN

PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN (SIPP PKB)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Undang - undang Nomor 18 tahun 2019 jo Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan 2 Kesehatan Hewan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 4 Permentan RI Nomor 03 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner 5 Permentan RI Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner 6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar 7 Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertaninan 8 Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan	Berpendidikan minimal D3/S1 Mampu mengoperasikan komputer dan TIK Menguasai komunikasi publik (public speaking) Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP Pelayanan Konsultasi SOP Helpdesk SOP Pengawasan	1. Komputer/Laptop 2. Printer/Scanner 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
 Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 	Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loket pendaftaran

PROSEDUR SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER PELAYANAN PEMERIKSAAN KEBUNTINGAN (SIPP PKB)

		PELAKSANA			MUTU BAKU			
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	AKUN SIWALI komtek/PD TEKNIS	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Keswan.	5 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun DKPP Kab.Madiun.	Tidak	Ya		Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	450 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Checklist Penilaian Kesesuaian	2.250 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Rekomendasi Perangkat Daerah Teknis	900 menit	produk izin jadi	
			·	1	1	3.635 menit (8 hari)		

Catatan

1 hari kerja = 7.5 jam

1 hari kerja = 450 menit

KEPALADPMPTSI

ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH NIP. 19750925 199602 1 003



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

15 Juli 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN

RIK KRISDIANANTO,S.STP,MH
NIP. 19750925 199602 1 003

Nama SOP

EURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER TEKNIK REPRODUKSI (SIPP ATR)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Undang - undang Nomor 18 tahun 2019 jo Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan	1. Berpendidikan minimal D3/S1
2 dan Kesehatan Hewan	2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK
3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	3. Menguasai komunikasi publik (public speaking)
4 Permentan RI Nomor 03 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner	4. Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA
5 Permentan RI Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar	
7 Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertaninan	
8 Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner
3. SOP Pengawasan	3. Jaringan Internet
	4. Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
l. Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loke pendaftaran
2. Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor 3. Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima	

PROSEDUR SURAT IZIN PARAMEDIK VETERINER TEKNIK REPRODUKSI (SIPP ATR)

			PELAKSANA		MUTU BAKU			
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	AKUN SIWALI KOMTEK/PD TEKNIS	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGA N
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.	—			Persyaratan Perizinan sektor Keswan.	5 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyarat an Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun DKPP Kab.Madiun.	Tida	Ya		Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	450 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
4	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Checklist Penilaian Kesesuaian	2.250 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Rekomendasi Perangkat Daerah Teknis	900 menit	produk izin jadi	
						3.635 menit (8 hari)		

Catatan

1 hari kerja = 7.5 jam

1 hari kerja = 450 menit

KEPALAOPMPTSF

ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH NIP. 19750925 199602 1 003



Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MADIUN

ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH
NIP. 19750925 199602 1 003

000.8.3.4/61/SOP/402.106/2024

FIRE SOLDERS VISION		CONTRACTOR OF THE PARTY OF				
DINAS	PENANAMAN	MODAL.	DAN	PELAVANAN	TERPARII	SATH PINTH
DIMMO	L ETAVELA WINITED	MODEL	DWM	LEPWINN	LEKTADU	SALU PINI

Nama SOP

Nomor SOP

SURAT IZIN USAHA VETERINER (SIVET)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Berpendidikan minimal D3/S1
Undang - undang Nomor 18 tahun 2019 jo Undang - Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan 2 dan Kesehatan Hewan	2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK
3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	3. Menguasai komunikasi publik (public speaking)
4 Permentan RI Nomor 03 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner	4. Mengerti dan memahami alur kerja non OSS RBA
5 Permentan RI Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
6 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar	
7 Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertaninan	
8 Peraturan Bupati Madiun Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop
2. SOP Helpdesk	2. Printer/Scanner
3. SOP Pengawasan	3. Jaringan Internet
	4. Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap	Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam melalui loke pendaftaran
2. Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor 3. Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima	

SURAT IZIN USAHA VETERINER (SIVET)

			PELAKSANA		MUTU BAKU			
NO.	URAIAN PROSEDUR	Pemohon	AKUN SIWALI KOMTEK/PD TEKNIS	Akun SIWALI DPMPTSP	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Pemohon mendaftar dan mengunggah dokumen pengajuan persyaratan izin pada Aplikasi SIWALI melalui akun pemohon.				Persyaratan Perizinan sektor Keswan.	5 menit	Akun Akses SIWALI pemohon (username/password)	- Persyaratan Terlampir
2	Komtek melakukan validasi pada akun SIWALI melalui akun DKPP Kab.Madiun.	Tidak	Ya		Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	15 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
3	Jika sudah sesuai akan diteruskan ke akun SIWALI DPMPTSP				Persyaratan Perizinan sektor Kesehatan	450 menit	Berkas file pdf yang terverivikasi	
	Proses validasi perizinan oleh Analis Kebijakan Ahli Muda/Madya dan Kepala Dinas.				Checklist Penilaian Kesesuaian	2.250 menit	Rancangan dokumen perizinan	
5	Izin diserahkan ke pemohon.				Rekomendasi Perangkat Daerah Teknis	900 menit	produk izin jadi	
						3.635 menit (8 hari)		

Catatan

1 hari kerja = 7.5 jam

1 hari kerja = 450 menit

ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH NIP. 19750925 199602 1 003



	Nomor SOP	000.8.3.4/62/SOP/402.106/2024		
LABUPATEN	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024		
	Tanggal Revisi	9 m		
	Tanggal Pengesahan	N		
AND TO A	Disahkan oleh	ARIK KRISDIANANTO,S,STP,MH		
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN				
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	PENGAWASAN RUTIN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana			
1. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Berpendidikan minimal	D3/S1		
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK			
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peneyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	3. Menguasai komunikasi publik (public speaking)			
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peneyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah	4. Mengerti dan memahami alur kerja OSS RBA			
5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	5. Mengerti dan memahami alur kerja LKPM			
 Peraturan Menteri Investasi / Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko 				
 Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun 				
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan			
1. SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop			
2. SOP Helpdesk OSS RBA	2. Printer/Scanner			
	3. Aplikasi OSS RBA			
	4. Jaringan Internet			
	5. Alat Tulis Kantor			
Peringatan	Pencatatan dan pendataan			
 Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap 	1. Kelengkapan persyarata	n pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko		
2. Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor 3. Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima				

PROSEDUR PENJADWALAN PENGAWASAN RUTIN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA						
NO.		Pengawas	Sistem OSS RBA	Pelaku Usaha	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Melakukan verifikasi atas NIB							
2	Pemberitahyan palaka				Akun Koordinator Pengawasan OSS RBA, email, No HP/Whatsapp	15 menit	list obyek dan jadwal	Disesuaikan dengar kestabilan jaringan internet
	Pemberitahuan pelaksanaan pengawasan kepada pelaku usaha				Undangan, Surat tugas	1.350 menit	usulan jadwal	- Disesuaikan dengar kestabilan jaringan internet
	Pengawasan di lokasi kegiatan usaha				Akun Koordinator Pengawasan OSS RBA, akun Pengawas OPD, email, No HP/Whatsapp	450 menit (1 hari)	undangan dan surat tugas	mernet
	Pembuatan berita acara hasil pengawasan				Akun Koordinator Pengawasan OSS RBA, akun Pengawas OPD, email, No HP/Whatsapp	120 menit	Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Pengawasan	
5	Upload Berita Acara hasil pengawasan melalui sistem OSS RBA Rekomendasi Admin Pengawasan OSS RBA				Akun Koordinator Pengawasan OSS RBA, akun Pengawas OPD, email, No HP/Whatsapp	15 menit	Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Pengawasan	- Disesuaikan dengar kestabilan jaringan internet
	erbaikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		-		Akun Koordinator Pengawasan OSS RBA, akun Pengawas OPD, email, No HP/Whatsapp	2.250 menit (5 hari)	Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Pengawasan	- (Pembinaan, Perbaikan, Sanksi)
	renzman Berusaha Berbasis Risiko			*	Akun Koordinator Pengawasan OSS RBA, email, No HP/Whatsapp	60 menit	Profil Pelaku Usaha Kepatuhan Pelaku Usaha Penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada pengawasan	Semua berkas dalar bentuk softfile atau hardfile pdf
tan :	TOTAL	WAKTU	1			4.260 menit (9 hari)		

1 hari = 7.5 jam

1 hari = 450 menit

ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

15 Juli 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

KETALA DPMPTSP,

ARIK KRISDIANANTO,S,STP,MH

Nama SOP

PENGAWASAN INSIDENTIL PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
1 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	1. Berpendidikan minimal D3/S1				
2 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	2. Mampu mengoperasikan komputer dan TIK				
3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peneyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	3. Menguasai komunikasi publik (public speaking)				
4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peneyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah	4. Mengerti dan memahami alur kerja OSS RBA				
5 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	5. Mengerti dan memahami alur kerja LKPM				
6 Peraturan Menteri Investasi / Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko					
7 Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun					
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan				
1. SOP Pelayanan Konsultasi	1. Komputer/Laptop				
2. SOP Helpdesk OSS RBA	2. Printer/Scanner				
	3. Aplikasi OSS RBA				
	4. Jaringan Internet				
	5. Alat Tulis Kantor				
Peringatan	Pencatatan dan pendataan				
 Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima 	Kelengkapan persyaratan pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risi				

PROSEDUR PENJADWALAN PENGAWASAN INSIDENTIL PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

NO.	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			l N	KETERANGAN		
		Pengawas	Sistem OSS RBA	Pelaku Usaha	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Melakukan verifikasi atas NIB				Akun Koordinator Pengawasan OSS RBA, email, No HP/Whatsapp	15 menit	list obyek dan jadwal	Disesuaikan dengan kestabilan
2	Pengawasan di lokasi kegiatan usaha				Akun Koordinator Pengawasan OSS RBA, akun Pengawas OPD, email, No HP/Whatsapp	450 menit (1 hari)	undangan dan surat tugas	10
3	Pembuatan berita acara hasil pengawasan				Akun Koordinator Pengawasan OSS RBA, akun Pengawas OPD, email, No HP/Whatsapp	120 menit	Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Pengawasan	
4	Upload Berita Acara hasil pengawasan melalui sistem OSS RBA				Akun Koordinator Pengawasan OSS RBA, akun Pengawas OPD, email, No HP/Whatsapp	15 menit	Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Pengawasan	 Disesuaikan dengan kestabilan jaringan interne
5	Rekomendasi Admin Pengawasan OSS RBA			9	Akun Koordinator Pengawasan OSS RBA, akun Pengawas OPD, email, No HP/Whatsapp	2.250 menit (5 hari)	Berita Acara Pemeriksaan dan Rekomendasi Pengawasan	- (Pembinaan, Perbaikan, Sanksi)
	Perbaikan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko			→	Akun Koordinator Pengawasan OSS RBA, email, No HP/Whatsapp	60 menit	Profil Pelaku Usaha Kepatuhan Pelaku Usaha Penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada pengawasan	- Semua berkas dalam bentuk softfile atau hardfile pdf
	TOTAL	WAKTU	1			2.910 menit (6 hari)		

Catatan:

1 hari = 7.5 jam 1 hari = 450 menit

ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH

And the second s		
LABUPATEN ,	Tanggal Pembuatan	15 Juli 2024
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN	Disahkan oleh	ARIK KRISDIANANTO,S.STP,MH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Nama SOP	PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS OSS RBA
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1. Berpendidikan minin	nal D3/S1
2 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	2. Mampu mengoperasi	ikan komputer dan TIK
3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Peneyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	3. Menguasai komunika	asi publik (<i>public speaking</i>)
4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peneyelenggaran Perizinan Berusaha di Daerah	4. Mengerti dan memah	nami alur kerja OSS RBA
	1	

Nomor SOP

000.8.3.4/64/SOP/402.106/2024

4 Peraturan Pemerintah 5 Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik 6 Peraturan Menteri PANRB Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun Keterkaitan Peralatan/perlengkapan 1. SOP Pelayanan Konsultasi 1. Komputer/Laptop 2. SOP Helpdesk OSS RBA 2. Printer/Scanner 3. SOP Pengawasan 3. Aplikasi OSS RBA 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor Pencatatan dan pendataan 1. Pencapaian penyelesaian waktu dalam SOP dipersepsikan dalam kondisi normal dan lengkap 1. Kelengkapan persyaratan pendaftaran perizinan masuk dalam aplikasi OSS 2. Penampilan petugas pelayanan harus selalu dijaga sampai dengan selesai jam operasional kantor RBA 3. Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan azas pelayanan prima

PROSEDUR PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS OSS RBA

NO.	URAIAN PROSEDUR			MUTU BAKU				
		Pelaku Usaha	Front Office	Sistem OSS RBA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1	Pelaku usaha melakukan pergajuan perizinan berusaha berbasis resiko melalui Petugas Front Office	—	———		Akun Email, NPWP, KTP, Nomor HP yang terkoneksi dengan Whatsapp dan Email	5 menit	File Dokumen kelengkapan	Disesuaikan dengan kestabilan jaringan internet
2	Pemrosesan Perizinan Berusaha melalui Aplikasi Sistem OSS RBA		Tidak	Ya	Akun Email, NPWP dan VA BPJS (opsional), KTP, Nomor HP yang terkoneksi dengan Whatsapp dan Email, Alamat Usaha, Skala Usaha, Skala Risiko, Permodalan, KBLI 2020	20 menit	Dashbord pertanyaan di sistem OSS RBA disesuaikan dengan pemilihan KBLI 2020	- Prosedur tergantung pada kestabilan jaringan internet - Proses perizinan terkait Sertifikat Standart, PB- UMKU, PKKPR, PKPLH dan Izin tergantung pemrosesan di Perangkat Daerah/Propinsi /(K/L) Teknis - Disesuaikan dengan tahap proses berdasarkan skala resiko (Rendah, Menengah Rendah, Menengah KBLI 2020 dipilih pelaku usaha berdasakan eksisting usaha yang dilakukan

	URAIAN PROSEDUR		PELAKSANA		MUTU BAKU			
NO.		Pelaku Usaha	Front Office	Sistem OSS RBA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
3	Penerbitan NIB berdasarkan bidang usaha/KBLI yang dipilih			7	Akun Email, NPWP, KTP, Nomor HP yang terkoneksi dengan Whatsapp dan Email, Alamat Usaha, Skala Usaha, Skala Risiko, Permodalan, KBLI 2020	5 menit	NIB dan dokumen penyerta sesuai skala risiko usaha	- Output untuk skala risiko rendah adalah NIB dan (self declaire), untuk skala risiko menengah rendah adalah NIB dan Sertifikat Standar, untu skala risiko menengah tingg adalah NIB dan Sertifikat Standar (verifikasi K/L/D) dan untuk skala risiko tinggi adalah NIB, Sertifikat Standar (verifikasi K/L/D) dan untuk skala risiko tinggi adalah NIB, Sertifikat Standar (verifikasi K/L/D) dan Izi Semua berkas dalam bentuk file pdf dan daj di cetak mandi oleh pelaku usaha
						30 men	it	AD BACK

Catatan

1 hari = 7.5 jam 1 hari = 450 menit

ARIK KRISDIANANTO, S.STP, MH